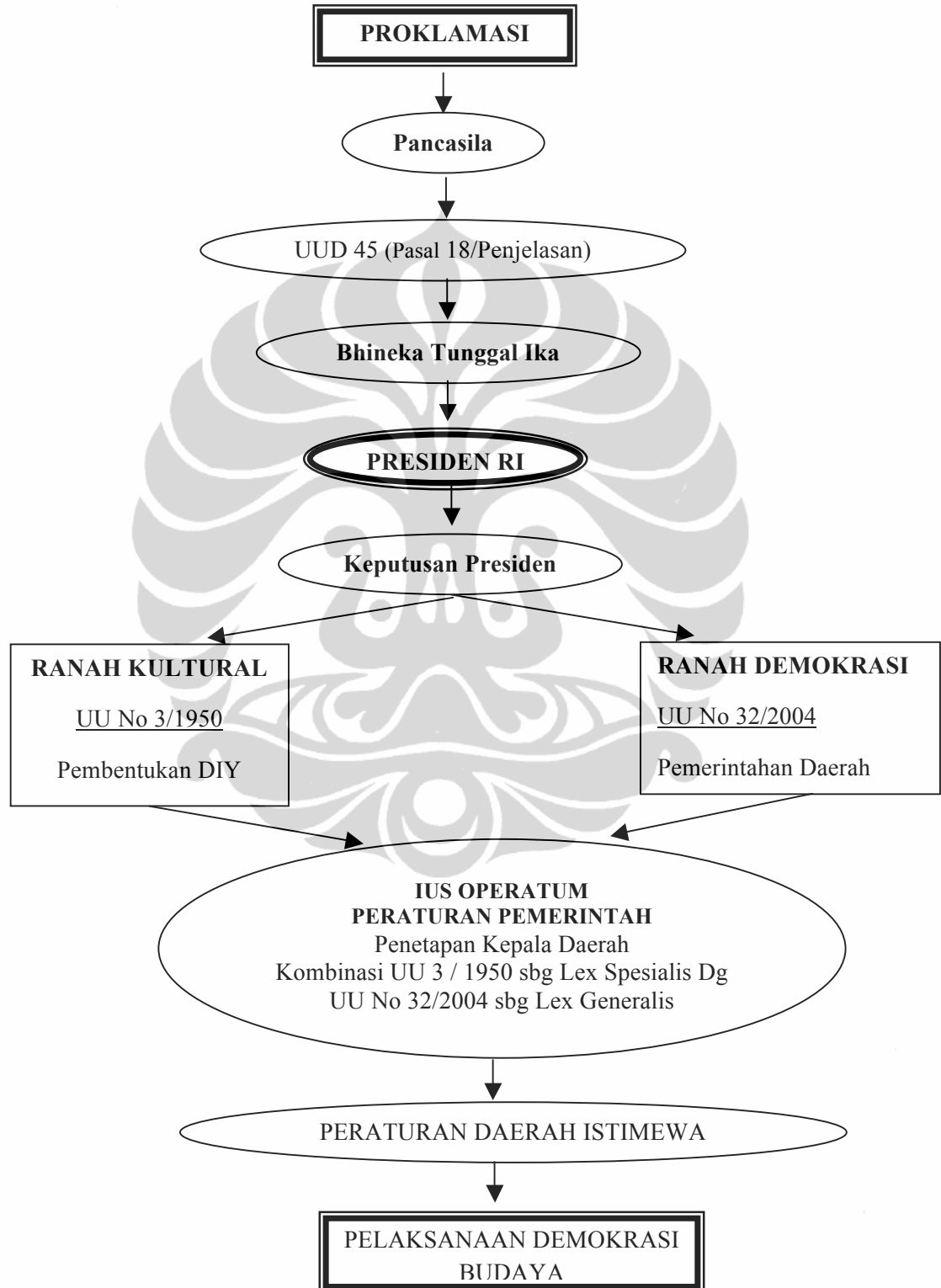


Alur Legitimasi Hukum DIY Sebagai Daerah Istimewa Menurut Fraksi Golongan Karya DPRD Provinsi DIY



Pedoman Wawancara

(Diselaraskan dan dikembangkan sesuai dengan situasi, termasuk bahasa yang dipakai, bisa pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia)

1. Perkenalkan pak saya Adhi dari... kalau nama bapak /ibu/kanda/dinda? (jika belum tahu namanya)
2. Bapak / ibu/kanda/dinda asli dari sini (DIY) atau...? (jika belum tahu asalnya).
3. Sudah berapa lama bapak tinggal di DIY? (jika bukan asli DIY)
4. Apa posisi bapak/ibu/kanda/dinda di DIY sekarang ini? (tokoh masyarakat biasa / pegang jabatan publik)
5. Bapak / ibu/kanda/dinda tahu ya bahwa Yogyakarta ini daerah istimewa?
6. Kenapa sih Yogyakarta disebut sebagai daerah istimewa?
7. Apa yang membedakannya dengan daerah lainnya?
8. Bapak sering ngobrol tentang keistimewaan DIY dengan orang lain? (Di mana saja? Dengan siapa saja?)
9. Setelah melakukan obrolan itu, pernah tidak kemudian sepakat untuk melakukan obrolan itu dengan orang yang lain lagi secara bersama-sama?
10. Dari obrolan itu pernah tidak kemudian bapak merasa tertarik untuk ikut demonstrasi atau kegiatan lainnya secara bersama-sama dengan teman2 ngobrol bapak itu?
11. Saat Sri Sultan Hamengkubuwono IX meninggal dunia, SHB X kemudian dinobatkan sebagai raja untuk menggantikannya, akan tetapi tidak secara langsung HB X diangkat menjadi gubernur. Yang diangkat menjadi Gubernur adalah Sri Paduka PA VIII. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana bapak melihat itu?
12. Kenapa saat SHB IX hidup UU keistimewaan DIY tidak segera dibentuk?
13. Kenapa harus berlangsung lama?
14. Dengan adanya Pisowanan Agung yang menyatakan SHB X tidak lagi bersedia menjadi gubernur DIY, sepertinya SHB X legowo (berbesar hati) menyerahkan sepenuhnya penentuan bentuk keistimewaan DIY kepada masyarakat DIY. Menurut bapak/ibu/kanda/dinda kenapa Ngarso Dalem (SHB X) tidak langsung saja memakai kekuatan / pengaruhnya sebagai raja untuk memberikan usulan sesuai keinginannya tentang bagaimana bentuk UU keistimewaan ini sebaiknya kedepan? Padahal dengan kekuatan Sultan sebagai seorang raja, bisa saja berpengaruh untuk menekan pemerintah pusat agar menentukan bentuk UU keistimewaan DIY sesuai dengan keinginannya?
15. Dalam usaha membuat UU, terkait perumusan UU keistimewaan DIY sekarang ini, sepertinya di DIY ramai sekali banyak kelompok masyarakat yang pro dan kontra keistimewaan. Bagaimana bapak melihat hal itu?
16. Menurut bapak bentuk keistimewaan DIY ini kedepan sebaiknya bagaimana?
17. Apa usaha yang pernah bapak lakukan untuk mempertahankan keistimewaan DIY seperti sekarang ini? (untuk pendukung keistimewaan DIY)
18. Apa usaha yang pernah bapak lakukan untuk merubah bentuk keistimewaan DIY agar tidak seperti sekarang ini? (untuk penolak keistimewaan DIY)
19. Apa saja kelompok yang mendukung? Kenapa mendukung?
20. Apa saja kelompok yang menolak? Kenapa Menolak?

**Beberapa Point Pernyataan Informan
(Hasil Wawancara)**

Nama	Identitas Informan	Pernyataan	Pokok Bahasan
KH. Muhaimin	Tokoh masyarakat DIY yang aktif dalam diskursus keistimewaan DIY. Ketua Yayasan Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) DIY.	<p>“.....Yogyakarta sebagai kerajaan merupakan negara merdeka yang dianggap tidak pernah dijajah langsung oleh Belanda, walaupun ada beberapa Sri Sultan Hamengkubuwono yang terlihat tunduk pada Belanda, tapi DIY tetap dianggap oleh Belanda Sebagai kerajaan yang merdeka. Jika masyarakat Yogyakarta menginginkan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebenarnya bisa saja, cuma Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan masyarakat DIY telah menyatakan bahwa integrasi kedalam NKRI adalah final.....”</p>	Perubahan bentuk pemerintahan DIY
		<p>”Kinerja dan sosok personal Sultan HB X dan Sultan HB IX sangat berbeda jauh. Sultan HB IX adalah Sultan yang saya akui paling baik diantara yang lain.”</p>	Kinerja Sultan HB IX dan HB X
		<p>“Saya akan lebih sepatutnya jika Herdjuno Darpito ketika naik tahta tidak bergelar Sri Sultan HB X tapi cari gelar lain, sebab sudah saatnya Sultan Hamengkubuwono cukup sampai yang ke IX, sebab angka tertinggi dan terbaik adalah angka IX”</p>	Menurunnya otoritas yang dimiliki Sultan HB X
Doni	Warga DIY	<p>“..Keistimewaan DIY sulit dijelaskan dengan kata-kata, sebab terkait dengan kekuatan gaib yang ada di kraton. Hanya orang tertentu yang dapat mengetahui semua hal kenapa Yogyakarta memiliki Keistimewaan. Untuk dapat mengetahui bagaimana sebenarnya Keistimewaan DIY, perlu melakukan laku batin selama tujuh hari berturut-turut, tidak boleh tidur siang malam, tidak boleh makan kecuali makan satu buah pisang setiap hari, minumannya juga cuma minum satu gelas kopi setiap hari ...”</p>	Substansi Keistimewaan DIY
		<p>”Beda jauh kharisma Sultan HB X dibanding bapaknya, waktu gunung Merapi</p>	Kinerja Sultan HB IX

		<i>mau meletus, ada badai, dan Yogyakarta akhirnya gempa adalah contohnya..”</i>	dan HB X
		<i>“....Sekalipun terlihatnya hampir semua masyarakat DIY ini mendukung keistimewaan. Tetapi sebenarnya banyak juga yang menginginkan diadakannya pemilihan gubernur, tapi tidak terlihat...”</i>	Adanya kelompok penolak keistimewaan
Miu	Karyawati sebuah produk kecantikan.	<i>“Di yogya, hampir semua salon tidak lagi menjadi tempat perbincangan hal-hal yang berbau politik. Hampir semua perbincangan di salon tidak ada yang bersifat politis..”</i>	Salon di DIY jarang menjadi ruang publik politis
AAGN Dwipayana	JIP UGM/ masyarakat kampus	<i>“...Ada kelambanan pemerintah pusat untuk memperjelas bentuk keistimewaan DIY, ini berbeda dengan Aceh dan Papua yang Istimewa karena konteks politiknya. Ada tekanan internasional untuk membuat undang-undang keistimewaan Aceh dan Papua cepat, tapi di DIY ini tidak ada tekanan...”</i>	Kinerja pemerintah pusat dalam proses pembuatan UUK DIY
		<i>“...Atau memang topik keistimewaan ini tidak begitu penting dalam konteks nasional. Mungkin dalam konstelasi kepentingan politik nasional ini Yogya tidak penting sebab Investasi yang penting di Yogya itu apa sih yang menguntungkan? Sumber Daya Alam yang baru muncul seperti pasir besi saja masih bermasalah juga kan dari segi hak asasi manusia?”</i>	Indikasi pemerintah pusat kurang menganggap penting keistimewaan DIY
KRT Jatiningsrat	Tokoh Masyarakat DIY	<i>“.....Iya jelas itu seperti mendagri menolak keistimewaan DIY sebab menghendaki paradya, jelas itu, dan itu sumbernya ya di JIP itu Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Politik..”</i>	JIP UGM Penolak Keistimewaan DIY
		<i>”.... di tingkat lokal memang ada semacam satu kontestasi politik atau persaingan politik, buktinya beberapa partai nasional yang berbasis di Jogja tidak sepenuh hati mendukung Keistimewaan Yogyakarta, ini bisa dilihat dari sejauh mana peran mereka di Nasional, di Jakarta? Kita kan punya anggota Legeslatif dari PAN, PPP, PKB dan partai- partai lain di luar DPD untuk</i>	Dinamika politik lokal

		<i>memperjuangkan Keistimewaan...”</i>	
		<i>“.....Adapun yang menghendaki dirubah sedemikian rupa kemudian menempatkan Sultan dan PA sebagai Pararadyo ini adalah Departmen Dalam Negeri yang memesan draft keistimewaan ini pada Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM... Penjajah semua mereka itu...”</i>	JIP penolak keistimewaan
Laode Arham	Aktivis Pusat Studi Hak Asasi Manusia Univeritas Islam Indonesia Yogyakarta.	<i>“...Ini kegagalan politik dari anggota DPD yang empat orang itu padahal salah seorangnya adalah GKR Hemas, menurutku mereka gagal dalam menggolkan RUU keistimewaan menjadi UU Keistimewaan...”</i>	Indikasi pemerintah pusat kurang menganggap penting keistimewaan DIY
		<i>“...Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan Sultan jadi gubernur apa tidak, kebijakan-kebijakannya yang pro neo liberal itu yang perlu dihilangkan, karena demokrasipun belum tentu menghasilkan kepemimpinan yang berpihak pro rakyat. Sekarang Sultan telah pro kapitalis, jadi Sultan sebaiknya tidak usah jadi Gubernur...”</i>	Menolak keistimewaan DIY
		<i>“...Yang namanya bule itu kalau ke Jogja, mereka lebih senang ke pantai parangtritis, ke Gunung Kidul, ke desa-desa, ke alam dari pada ke mal-mal seperti Ambarukma Plaza, dsb..”</i>	Pembangunan tidak pro rakyat
		<i>“...Bukan mal-nya yang diperbanyak dan juga industri hedonisme hiburan yang ditumbuhkan pesat, sebab yang untung siapa? Yang punya mal, diskotik, kafe itukan kebanyakan bukan orang DIY yang punya, tapi investor entah dari Perancis, Belanda, Australia, Finlandia, Selandia Baru, atau yang lainnya...”</i>	
		<i>“...adanya riwayat hukum yang melibatkan keluarga kraton yang mendapat intervensi pihak kraton dan Pakualaman seperti ini, baik yang melibatkan Sultan secara langsung ataupun tidak, semua ini adalah sesuatu yang buruk dan tidaklah bagus...”</i>	Intervensi hukum

		<i>"...di DIY ini terjadi, indikatornya itu ada didalam APBD Provinsi DIY yang sebagian besar dipakai untuk kepentingan operasional para pejabatnya....."</i>	Birokrasi self servis
Marsudi	Penjual Angkringan di DIY	<i>"....saya mendukung keistimewaan DIY, sebab dibawah kekuasaan Sultan, kehidupan masyarakat DIY ayem tentrem, tidak ada keributan politik masalah demokrasi seperti daerah lain. Adanya tuntutan demokrasi daerah lain sebenarnya tidak peduli sekali tentang hal itu karena lebih baik dagang / focus kerja cari uang saja yang lebih jelas..."</i>	Alasan mendukung keistimewaan DIY
Ariedjito	Akademisi	<i>Sejak industrialisasi ditempuh pemerintah kota (juga kabupaten), mengikuti agenda otonomi daerah, nampaknya kiblat skenario pembangunan adalah perbesaran pendapatan asli daerah (PAD). Belum berubah dari ideologi pembangunan lama warisan pemerintahan orba, kendatipun sekarang bergeser ke arah neo-liberalisme.</i>	Indikasi neoliberalisme di DIY
Faisal	Mahasiswa	<i>"Ya...Unwama atau UCY itu salah satu kampus yang semakin sedikit jumlah mahasiswanya, kampus-kampus lain juga sama, citra DIY sebagai kota pendidikan sudah semakin menurun, pembangunan mal dimana-mana...."</i>	Menurunnya citra pendidikan DIY
Tono	Ketua Umum SMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	<i>"Ya, selama ini kami memang belum pernah membahas tentang keistimewaan DIY dalam forum-forum diskusi kami, bagi kami kayaknya itu kurang menarik"</i>	Mahasiswa kurang tertarik isu keistimewaan DIY
Harmanu	Warga Desa Tamantirto, Kasihan, Bantul.	<i>"...Saya asli orang sini, tapi tidak begitu tahu tentang masalah itu. Saya belum pernah dilibatkan dalam pertemuan Ismaya/ Forum Ngeman Sultan, atau Forum-Forum yang lainnya. Yang saya tahu, biasanya sih yang ngurus-ngurus kayak gitu cuma orang-orang tertentu. Saya dengar memang sekarang sedang ada pembuatan UU tentang gubernur, saya tidak tahu banyak, saya cuma sering dapat informasi tentang masalah itu datangnya dari orang-orang tertentu seperti pak Kadus (Kepala Dusun),</i>	Gerakan Ismaya Top Down, rawan disusupi para demagog demokrasi

		<p><i>Pak Kades, dsb”.</i></p> <p><i>“...Saya asli orang sini, tapi tidak begitu tahu tentang masalah itu. Saya belum pernah dilibatkan dalam pertemuan Ismaya/ Forum Ngeman Sultan, atau Forum-Forum yang lainnya. Yang saya tahu, biasanya sih yang ngurus-ngurus kayak gitu cuma orang-orang tertentu. Saya dengar memang sekarang sedang ada pembuatan UU tentang gubernur, saya tidak tahu banyak, saya cuma sering dapat informasi tentang masalah itu datangnya dari orang-orang tertentu seperti pak Kadus (Kepala Dusun), Pak Kades, dsb”</i></p>	
Suyatman	Kepala Desa Taman Tirto, Kasihan, Bantul	<i>“Saya menjadi anggota Ismaya karena dulu mendapat surat edaran dari bapak bupati Bantul. Jadi memang dapat dikatakan wajib setiap kepala desa ikut menjadi anggota Ismaya. Ismaya ini persatuan Lurah dan Pamong yang ada diseluruh Yogyakarta. Di setiap kabupaten ada namanya sendiri-sendiri. Ditingkat nasional sendiri ada persatuan ini yang namanya Adesi.”</i>	
Bapak Sumardi	Bendahara 2 Aspabeta (Penarik Becak Yogyakarta), Sekretaris Pabringan.	<p><i>“Bukan hanya kami bahas keistimewaan itu di tempat arisan, diangkringan juga sering, dari tempat seperti itu terus kami ikut demo mendukung keistimewaan itu. Pernah kami beramai-ramai untuk demo, yang kemarin itu kami demo beramai-ramai mendukung Keistimewaan DIY dengan datang ke kantor DPRD.</i></p> <p><i>”...kami ikut dukung keistimewaan, dalam Sidang Rakyat itu ya terutama, tidak ada yang membayar. Jangankan dapat bayaran, minum pun beli sendiri. Demo kami sukarela tidak ada yang membayar....Dengan mahasiswa memang sering kami ngobrol, tapi masalah lain....bukan masalah keistimewaan....”</i></p> <p><i>”...kami tidak ingin nanti kalau Ngarso Dalem tidak lagi menjadi Gubernur, terus orang yang berkunjung ke Yogja jadi sepi....</i></p>	<p>Peran ruang publik dalam mendukung keistimewaan DIY</p> <p>Alasan mendukung keistimewaan</p>

		<i>itu bagaimana, kan mending Ngarso Dalem yang menjadi Gubernurnya.”</i>	DIY
Ujun Junaedi	Ketua Pedagang Pasar Bringharjo (Pager Raharjo)	<i>“..Keistimewaan Jogjakarta ini adalah dalam hal figure pemimpin, memang secara otomatis ratu (Raja) juga seorang pemimpin birokrasi. Beliau sebagai ratu beliau juga otomatis sebagai gubernur..”</i>	Substansi Keistimewaan DIY
		<i>”Pada dasarnya memang kami adalah mewakili suara dari para pedagang....., biarpun di ketahui pedagang waktunya sangat sibuk sekali yah...untuk itu terkadang mereka diwakili oleh kordinator-kordinator los itu..”</i>	Bentuk gerakan kelompok pendukung keistimewaan DIY
		<i>”...pertemuan pengurus itu meliputi dari struktur inti dan dari kordinator-kordinator los... kita sering juga ketemu, diluar satu pertemuan rutin yang membahas masalah internal, dalam pertemuan itu kita sering sikapi permasalahan yang ada di Jakarta, khususnya permasalahan keistimewaan itu...</i>	
		<i>“...Sering ikut juga tergabung dengan paguyuban-paguyuban yang ada di kota Jogjakarta. saya mewakili dari pasar Jogjakarta meliputi 31 pasar yang ada di kota Jogjakarta yang kurang lebih jumlah dari pedagangnya ada 16 ribu pedagang...”</i>	
		<i>”...saya memakai media massa juga untuk perjuangan, dalam media massa ini saya sering sekali mengisi rubrik yang memang disediakan untuk kelompok kami dengan masalah keistimewaan DIY”</i>	Peran ruang publik dalam mendukung keistimewaan DIY
Dedi Suwandi SH.	Anggota DPRD Propinsi DIY. Ketua Pansus Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat DIY tentang Keistimewaan DIY tahun 2008	<i>“.....Sultan mempunyai kehatian baik untuk membangun DIY, kami-pun demikian, jadi kami bisa berjalan beriringan. Sultan juga sangat menghormati tugas legeslatif yang diantaranya adalah penganggaran, dan penyusunan undang-undang.....”.</i>	Hubungan eksekutif - legeslatif
		<i>“.....Fungsi dewan (DPRD) itu kan pengawasan, penganggaran, regulasi, penyerapan aspirasi masyarakat. Sepertinya semua itu berjalan dengan baik. Pembahasan anggaranpun berjalan....”</i>	

Beberapa Bentuk Diskursus Masyarakat Sipil DIY Tentang Keistimewaan DIY Dalam Media Cetak

(Medio 2008)

Pokok Masalah	Aspirasi Publik	Sumber Berita
Soal Pilgub DIY tunggu RUUK.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi DIY, Dr. Agung Danarto, MAg. menyerukan pada warga masyarakat agar jangan melupakan sejarah, dan mengikuti aturan hukum yang berlaku terkait adanya pro-kontra di kalangan masyarakat maupun politisi soal pemilihan Gubernur DIY. Ke depan, apapun yang terjadi maka soal Keistimewaan DIY termasuk kultur yang ada di dalamnya harus tetap dipertahankan. • Mengenai pelaksanaan Pemilihan Gubernur DIY, Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki massa besar, harus menunggu penyelesaian Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY. Apabila RUUK DIY sudah jadi dan isinya mengharuskan adanya Pilkada, Muhammadiyah tetap akan mengikuti aturan yang berlaku, dan diharapkan Keistimewaan DIY tetap berjalan seperti yang sudah-sudah. 	Skh Bernas, Sabtu 2 Pebruari 2008 Hal. 1 & 6.
Usulkan konsep baru Keistimewaan DIY.	<ul style="list-style-type: none"> • Walaupun diakui konsep ini akan menimbulkan pro-kontra karena pasti ada yang mengatakan tidak mencerminkan demokrasi, namun menurutnya adalah sebuah demokrasi, sebab kita jangan berfikir bahwa demokrasi harus selalu identik dengan pemilihan langsung, sebab konsepsi demokrasi yang benar itu harusnya dapat dicari dan digali sesuai kultur dan budaya sendiri, dan jangan mau dipengaruhi oleh budaya orang lain. • Prof. Dr. PJ Soewarno, dari Fisipol UGM Yogyakarta mengatakan kedudukan keistimewaan Yogyakarta berdasarkan dari sejarah bergabungnya DIY kepada Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1945. Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa tertua di Indonesia, sejak adanya Maklumat 5 September 1945 yang dibuat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII untuk bergabung dengan NKRI, dengan Sri Sultan Hamengku Buwono IX di angkat menjadi Kepala Daerah bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden RI. 	Skh Bernas, Jumat 25 Januari 2008 Hal. 1 & 2
Dukungan Sultan menjabat Gubernur kian menguat.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakpastian nasib Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta berimbas pada soal suksesi pemimpin daerah. Dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas terungkap lebih dari 64 persen responden menginginkan Sultan Hamengku Buwono X otomatis menjadi Gubernur periode selanjutnya. Wacana dukungan kepada Sultan Hamengku Buwono X cenderung menguat. 	Skh. Kompas, 9/2/2008. Skh KR, 13/2/2008
Popularitas Hemas	<ul style="list-style-type: none"> • Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta terungkap bahwa popularitas Gusti Kanjeng 	Skh. Radar

<p>Ungguli Paku Alam IX</p>	<p>Ratu Hemas mengungguli Paku Alam IX dan kerabat Keraton lain seperti GBPH Joyokusumo, GBPH Prabokusumo dan GBPH Yudhaningrat. Alasannya, Hemas dipandang sebagai orang yang tepat karena dia merupakan orang yang paling dekat dengan Sultan Hamengku Buwono X dan dianggap mampu mengejawantahkan semua ide dan gagasan besar Sultan Hamengku Buwono X.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dari hasil polling tersebut juga terungkap bahwa sebanyak 71 persen responden menginginkan Gubernur mendatang tetap berasal dari lingkungan kerabat Keraton Yogyakarta dan mayoritas 89,15 persentase Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta harus dipertahankan. 	<p>Jogja, Senin 11 Februari 2008 Hal 1 dan 7.</p>
<p>Pembangunan DIY abaikan warisan pusaka.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti dan staf pengajar Pusat Pelestarian Pusaka arsitektur Jurusan Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik UGM Yogyakarta, Dr. Eng Laretna T Adishakti menyayangkan proses pembangunan di Provinsi DIY mengabaikan warisan pusaka (heritage), padahal Yogyakarta menjadi anggota Kota Pusaka Dunia bagian dari Kyoto Jepang. • Fakta di lapangan memperlihatkan banyak pembangunan bersejarah beralih fungsi, hal ini terjadi karena pelestarian pusaka bukan dianggap sebagai bagian dari pembangunan, dan Pemerintah Provinsi DIY harus mengelola warisan pusaka seperti yang dilakukan Paris dan Kyoto yang selalu mempertahankan nilai-nilai pusaka warisan budaya leluhurnya. • Hal yang sangat menyedihkan, keberadaan Kotagede yang memerlukan perhatian akan tetapi kenyataannya pemerintah daerah tidak bisa mempertahankan 25 unit bangunan khas Kotagede berupa Joglo berpindah tangan dan berubah bentuk dari warisan pusaka. • Pemerintah Provinsi DIY perlu belajar dari kesalahan dari penataan kota di Amerika Serikat yang menerapkan konsep zoning, yang akibatnya pusat-pusat kota dengan jalan utama menjadi kawasan mati dan membahayakan karena rawan kriminalitas. 	<p>Skh Bernas, Sabtu 16 Februari 2008 Hal. 11.</p>
<p>Warga tolak Pemilihan Gubernur DIY.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ribuan warga Yogyakarta mendesak pemerintah pusat segera membahas dan menetapkan Rancangan Undang- Undang Keistimewaan (RUUK) DIY menjadi Undang-Undang, menolak digelarnya Pemilihan Gubernur DIY secara langsung, dan menuntut mekanisme penetapan otomatis pasangan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. 	<p>Skh Kompa 25 Februari 2008 Hal. A.</p>
<p>Pilgub atau Penetapan, terserah rakyat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Paguyuban Abdi Dalem Keprajan Gunungkidul KRT. Projoharjono, SH mengatakan Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak bersedia dicalonkan sebagai Gubernur, jika ditetapkan pasti bersedia karena memang sudah menjadi ciri khas Keistimewaan DIY, dimana Gubernur dan wakilnya adalah Sultan dan Paku Alam. Prinsipnya, Ngarso Dalem bersedia ditetapkan sebagai Gubernur DIY, yang tidak dimau jika dicalonkan. 	<p>Kedaulatan Rakyat, Rabu 27 Februari 2008. Kedaulatan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Sementara Direktur Central Social Development Studies Gunungkidul, Salmon Wibawanto mengajak semuanya mengembalikan masalah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada rakyat, karena belum benar-benar bertanya kepada rakyat, apakah rakyat menghendaki pemilihan. 	an Rakyat, Rabu 27 Februari 2008
Perangkat Desa tolak Pilgub DIY.	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Umum Paguyuban Lurah Desa dan Pamong Desa Suryo Ndadari, HM. Mulyadi mengatakan ratusan anggota Paguyuban Lurah dan Pamong Desa Suryo Ndadari, dan Paguyuban Dukuh Cokro Pamungkas Kabupaten Sleman tetap mendukung keistimewaan DIY. Paguyuban mengharapkan penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX tidak terikat masa jabatan, sehingga tidak ada lagi perdebatan lima tahunan terkait suksesi gubernur dan wagub, dan menolak pemilihan gubernur secara langsung di DIY. • Keistimewaan DIY adalah mutlak, bukan pemberian, akan tetapi pilihan sesuai amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII. Keistimewaan DIY harus segera disahkan, jika tidak akan meresahkan warga dan dikhawatirkan akan menimbulkan kericuhan. • Koordinator Gerakan Rakyat Yogyakarta (GRY), HM. Gozali, SE mengatakan munculnya sikap beragam soal Keistimewaan DIY, antara lain disebabkan oleh sikap Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX yang sampai saat ini belum jelas dan tegas. 	SKH. KR, Kamis 28 Februari 2008 Hal. 1 & 27.
Pilgub DIY	<ul style="list-style-type: none"> • Meski nasib suksesi Gubernur DIY dan mekanisme politik yang akan ditempuh dalam penentuan Gubernur DIY belum diputuskan, namun ternyata tak mempengaruhi semangat partisipasi politik sebagian masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. • Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas terungkap : sebagian responden (79%) tetap berkehendak menggunakan hak politik tersebut terlepas ada-tidaknya pemilihan gubernur secara langsung di DIY. Lebih dari separo responden berharap pemilihan langsung tersebut terselenggara pada tahun 2008 dan mayoritas responden tidak menolak jika Sultan Hamengku Buwono X ditetapkan kembali sebagai Gubernur DIY oleh Pemerintah Pusat. Dari hasil jajak pendapat tersebut tercermin bahwa sebenarnya rakyat DIY tidak terlalu rewel terhadap mekanisme apapun dalam menentukan gubernur. • Perlu adanya ketegasan aturan hukum perihal Jabatan Gubernur DIY dan Keistimewaan DIY perlu dilekatkan pada empat bidang utama yaitu pemerintahan, tata ruang, kebudayaan dan pertanahan serta bidang politik yang terkait dengan kepastian peran Keraton Yogyakarta dalam kepemimpinan daerah di DIY, karena proses politik penentuan kepemimpinan daerah DIY lebih ditentukan oleh negosiasi politik ketimbang regulasi yang jelas dan adanya wacana pengisian jabatan kepala daerah oleh seorang politisi di luar lingkungan Keraton yang sempat menjadi kontroversi. 	Skh. Kompas Kamis 6 Maret 2008 Hal A. Skh. Kompas Sabtu 8 Maret 2008 Hal A
Pernyataan Sultan	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut Hestu Cipto Handoyo, pakar hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono 	Skh. KR, 9&11

Hamengku Buwono X	<p>X yang tidak bersedia ditetapkan sebagai gubernur seumur hidup bisa bermakna ganda dan merugikan makna Keistimewaan Jogjakarta, karena makna pernyataan itu justru akan membuka konflik horisontal di masyarakat tradisional bisa dianggap memiliki agenda politik yang lebih besar pada tahun 2009 mendatang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sultan hendaknya menjelaskan secara terbuka kepadamasyarakat, mengapa tak bersedia karena selama ini penjelasan Sultan dinilai sulit dibaca dan ditangkap masyarakat awam • Hasil jajak pendapat yang dilakukan menggambarkan polarisasi sikap masyarakat Jogjakarta terhadap kepemimpinan DIY mendatang. Walaupun kepercayaan terhadap Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur masih tinggi (54,7%), disisi lain mulai tumbuh persepsi bahwa pemimpin Provinsi DIY tidak mutlak harus dari kalangan Keraton (30,6%) asalkan mampu mengemban amanah dalam menjalankan kepercayaan. 	Maret 2008. Skh. Kompas, 11 Maret 2008. Skh. Radar Jogja, 11 Maret 2008
Perlu bertanya kepada Sultan soal Keistimewaan DIY.	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Lembaga Kajian dan Sosial (LKdS) Gunungkidul, Aminudin Azis, S.Pd mengatakan ketidaksediaan Sri Sultan Hamengku Buwono X ditetapkan sebagai Gubernur seumur hidup dapat membingungkan masyarakat awam, karena selama ini berkembang pendapat, Ngarso Dalem bersedia jika ditetapkan sebagai Gubernur. Agar tidak membingungkan masyarakat, sebaiknya Sultan memberikan keterangan lugas dan tuntas tentang sikapnya. • Pernyataan secara detail dari Sri Sultan Hamengku Buwono X sangat dibutuhkan, sehingga masyarakat awam tidak banyak membuat penafsiran. Jika pernyataan bersifat multi tafsir, dikhawatirkan akan mempunyai tafsiran yang berbeda-beda dan kemungkinan akan banyak yang keliru. Sejak Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan tidak bersedia lagi menjadi Gubernur DIY, sebagian masyarakat menafsirkan banyak hal, ada yang menganggap tidak bersedia lagi menjadi Gubernur, dan ada yang menganggap masih bersedia melalui penetapan. • Direktur Central Social Development Studies (CSDS) Yogyakarta, Salmon Wibawanto mengatakan sabda Sultan secara jelas dinanti oleh rakyat, dan sebaiknya organisasi politik dan sosial yang selama ini sudah mengklaim suara rakyat untuk menahan diri dulu, karena selain belum tentu mewakili seluruh aspirasi rakyat, harus dilihat dulu kesediaan Sultan untuk menerima penetapan atau tidak. 	Skh KR, Senin 10 Maret 2008 Hal. 6.
Pendukung Pilgub tidak paham sejarah.	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator warga Pengok, Klitren, dan Bumijo, yang tergabung dalam Paguyuban (SEPUR-NKA) Yogyakarta, Ari Wibowo mengatakan Keistimewaan DIY merupakan bagian dari sejarah, oleh karena itu mereka yang tidak mendukung Keistimewaan DIY berarti tidak memahami sejarah, dan menolak dilakukannya Pilgub DIY • Warga SEPUR-NKA mendukung penetapan, dengan tujuan mewujudkan DIY sebagai daerah yang mempunyai keistimewaan 	Skh Bernas Jogja, Kamis 13 Maret 2008 Hal.

	<p>tersendiri yang mencakup tata pemerintahan, hukum ketatanegaraan, serta pola kehidupan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warga juga mengharapkan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X, untuk menertibkan tanah milik Keraton (Sultan Ground) yang ditempati oleh oknum atau perusahaan yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat Yogyakarta, seperti PT. Kereta Api yang menaikkan sewa rumah tanpa seizin pemilik yang syah yaitu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. 	1&3.
<p>Manuver kalau tujuannya baik kenapa tidak dan perlu didukung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Budayawan, Emha Ainun Nadjib mengatakan apabila Sri Sultan Hamengku Buwono X bermanuver politik, itu merupakan suatu hal yang sah-sah saja, karena raja Keraton Yogyakarta yang juga Gubernur DIY itu memiliki kepentingan atas manuver yang dikeluarkannya. • Sri Sultan Hamengku Buwono X seharusnya tidak perlu ragu untuk menentukan sikap, soal beliau mau menjadi raja, Gubernur, dan Presiden, itu haknya sebagai warga negara, yang penting bisa berguna bagi rakyat, dan Sultan sebaiknya lebih menonjolkan kependithaannya, bukan kerajaannya. • Perihal adanya desakan mundur atau keluar dari Partai Golkar, menurutnya Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak perlu mundur, sebab saat ini partai politik sebagai tempat politis bernaung tidak bisa menjadi tolok ukur kenetralan seseorang. • Kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebaiknya tidak membatasi diri pada konteks Kawulo Gusti Keraton Jogja, akan tetapi berkembang dan naik ke tingkat wacana kenegaraan yang lebih up to date, dan masyarakat harus menyadari betapa sulitnya Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengambil sikap. 	<p>Skh Radar Jogja, Rabu 12 Maret 2008 Hal. 1 & 7.</p>
<p>Warga diminta mengambil sikap tegas terhadap RUUK.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sleman, Wisnu Aji mengatakan masyarakat harus mampu berpikir jernih terhadap Pidato Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam orasi budaya pada tanggal 7 April 2007 sebagai manuver politik. Hal tersebut, seharusnya dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab Sultan untuk menjaga Keistimewaan DIY yang dilindungi oleh Undang-Undang. Masyarakat DIY tidak perlu mengartikan secara sempit dalam menafsirkan pernyataan Sultan, karena hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kelangsungan Keistimewaan DIY. • Pada saat orasi budaya itu, Sultan tidak mau dipertanyakan dengan ketidakpastian, karena selama ini belum ada kepastian mengenai Undang-Undang Keistimewaan DIY, walaupun sudah diatur Pasal 18 UUD 1945. • Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyerahkan kepada rakyat DIY terkait dengan bentuk Undang-Undang Keistimewaan DIY. Warga diharapkan agar mampu mengambil sikap yang jelas dalam menyampaikan aspirasi untuk Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY. 	<p>Skh Kompas, Rabu 12 Maret 2008 Hal. A.</p>